

Radar Politik Energi Rusia

Indonesia hanya perlu tetap berteman dengan kutub AS dan liganya, sekaligus bersahabat dengan China-Rusia dan aliansi mereka.



Pesan penting apa dari KTT Rusia-ASEAN 2026, di Kazan-Rusia (17-19 Juni), pasca-35 tahun hubungan keduanya? Geopolitik terus mendidih. Relasi antarnegara banyak yang retak. Konflik antaraliansi melebar. Akibat buruknya masif ke semua sendi relasi global, termasuk di bidang energi yang melemaskan ekonomi banyak negara. Ini waktunya bagi ASEAN untuk berretrospeksi.

Rusia satu di antara pencetus aliansi ekonomi BRICS+, bersama Tiongkok, Brasil, dan India. Visinya adalah multipolarisme, ketimbang unipolarisme. Yang mereka inginkan adalah gerak lentur masing-masing negara untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan siapa saja. Pola satu arah diubah menjadi banyak arah dan setara.

Aliansi ini memberikan nyawa baru bagi relasi global, mengubahnya menjadi lebih variatif dan banyak alternatif. Prioritas aliansi bergeser dari ideologis-militer-perang ke aliansi ekonomi-bisnis-kooperasi. Kendati kita tahu bahwa relasi global hampir selalu tidak seimbang. Negara *superpower* memegang posisi tawar lebih tinggi dari yang *mediumpower*, apalagi *lowerpower*.

ASEAN perlu mendorong relasi dengan Rusia menjadi hubungan bangsa yang lentur atau elastis dan multikutub, yang sejalan dengan prinsip ASEAN sendiri. Implikasi konkretnya nanti pada hubungan bisnis, terutama pada bidang energi, dengan Rusia bisa menjadi solusi terbaik di antara beberapa alternatif lainnya. Setelah berkonflik dengan Uni Eropa, Rusia memperkuat rute bisnis energinya ke Asia. Selain Afrika, rute Asia khususnya ASEAN adalah lalu lintas krusial energi "Beruang Merah". Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip regional seperti non-intervensi, solusi damai, non-agresi, dan lainnya, ASEAN bisa mengambil peluang terbaik dari kekayaan energi Rusia.

Kecepatan India dan Vietnam

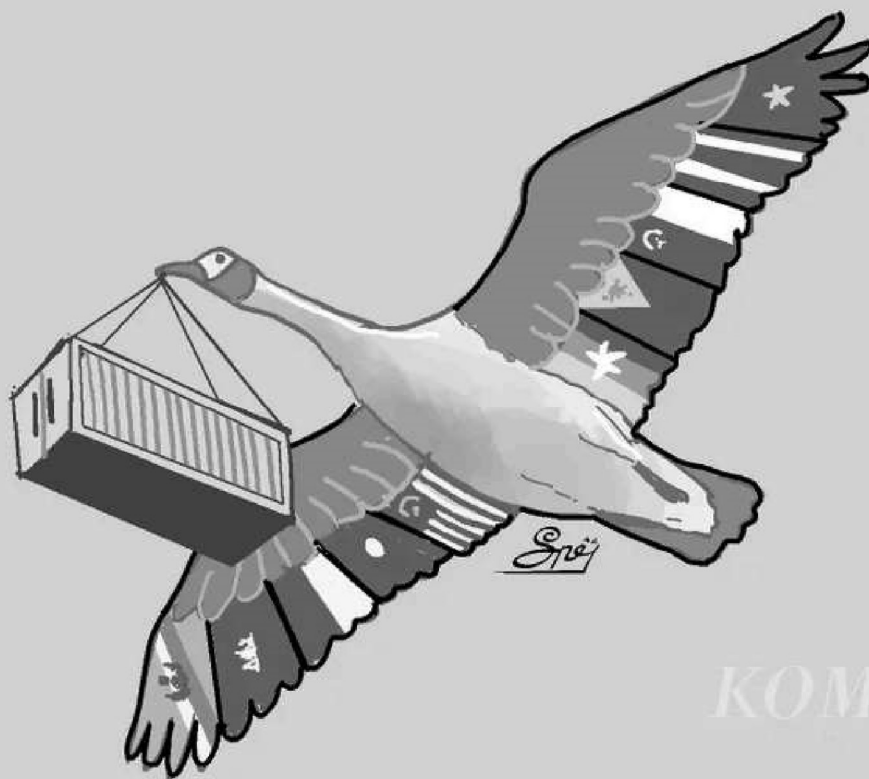
Satu contoh terbaik di Asia adalah India dan khusus di ASEAN adalah Vietnam. India mampu menangkap peluang visi *pivot to Asia* dari Presiden Rusia Vladimir Putin dan menanggapi dengan *pivot to the Russian oil* dalam bidang energi. Hasilnya, India sudah dan sedang membangun enam unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN), yang merupakan kerja sama antara perusahaan Rosatom-Rusia dan NPCIL-India.

India cakap memainkan catur global. Melalui Menteri Luar Negeri Subrahmanyam Jaishankar, India menetapkan visi kedaulatan energi melalui kerja sama komprehensif dalam bidang tersebut. Mereka tidak berdiri mengambang di tengah badai krisis energi global, tetapi mengambil sikap cepat dengan siapa harus bekerja sama dipandu oleh kecakapan berdiplomasi.

Vietnam, di sisi lain, berani menetapkan kebijakannya secara berdaulat. Kendati statusnya hanya negara mitra di BRICS+, Vietnam tidak ragu mengambil peluang dari visi *pivot to Asia* Putin dengan kerja sama energi merupakan salah satu jantungnya. Mereka paham betul bahwa Rusia adalah surga energi. Sumbernya besar. Pengelolaannya serius.

Vietnam mulai serius membaca tanda-tanda krisis energi. Mereka juga mengalami *blackout*, sembari mengamati kondisi serupa di beberapa negara ASEAN. Salah satunya, Indonesia. Karena itu, Hanoi memutuskan untuk menghidupkan lagi Kesepakatan Rusia-Vietnam 2009, yaitu Nuclear Power Plant (NPP) untuk listrik di Provinsi Ninh Thuan.

Ini keputusan geopolitik yang tentunya menghadapi benturan geopolitik pula, khususnya dari Amerika Serikat. Apakah Vietnam ragu-ragu? Tidak. Mereka menghadapi kecemasan AS itu. AS memang keberatan terhadap kerja sama kedua negara. Namun, diplomasi Vietnam mampu menetralisasi kecemasan AS dan sekutu-sekutunya, dengan mempererat kerja sama ekonomi.



Vietnam memiliki alasan yang cukup kuat untuk mempertahankan kerja sama dengan Rusia. Pertama, mereka melihat contoh Leningrad Nuclear Power Plant (LNPP) yang berhasil dan bekerja maksimal. Kedua, mereka menghadapi pilihan yang tidak mudah: melawan tekanan luar yang bisa membawanya ke kemerdekaan energi atau menghadapi *blackout* energi yang akan mengakibatkan *knockout* ekonomi. Dari gerak-gerik geopolitik, Vietnam tampaknya sadar betul bahwa solusinya terletak pada kecakapan dan kelincahan berdiplomasi. Mereka memaksakan diri menggunakan berbagai kanal untuk memitigasi konflik geopolitik.

KOMPAS/SUPRIYANTO

Poros energi Jakarta-Moskwa

Indonesia perlu langkah apa? Kita sudah masuk ke dalam samudra BRICS+. Badan kita sudah basah kuyup, sama seperti masuk ke dalam lautan Board of Peace buatan AS. Berenanglah agar tidak tenggelam. Indonesia hanya perlu tetap berteman dengan kutub AS dan liganya, sekaligus bersahabat dengan China-Rusia serta aliansi mereka.

Pemerintah Indonesia harus mampu berdansa di antara kutub-kutub itu. Tentu saja kita membutuhkan kecakapan dalam berdiplomasi yang dipadukan dengan sikap berani dan tidak ragu-ragu agar tidak tergelincir di lintasan licin kedua kutub. Ada hambatan geopolitik? Ada. Namun, itu bukan hal baru bagi kita, khususnya tekanan dari AS. Tinggal bagaimana Indonesia berdiplomasi dan menetapkan diri sebagai pemilik daulat.

Beberapa peristiwa *blackout* belakangan adalah tanda bahaya. Perlu revolusi kebijakan energi untuk mengatasinya. Dari dalam, kita butuh soliditas politik, juga kebijakan ekonomi yang patriotik. Nafasi kembali Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari luar, kita butuh solidaritas politik-ekonomi yang konkret. Misalkan, kerja sama dengan Rusia untuk percepat penyelesaian Kilang Minyak Baru Tuban (Tuban Grass Root Refinery). Apabila perlu, contohlah Vietnam yang telah mewujudkan kerja sama NPP.

Eduardus Lemanto *Direktur Eksekutif Analysis Centre for BRICS and ASEAN*

Versi cetak/epaper artikel ini terbit di
harian Kompas edisi **28 Juni 2026** di
halaman **7** dengan judul "**Radar Politik
Energi Rusia**".
